

**ANALISIS YURIDIS PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PEMBELIAN MOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi
Strata 1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ARNO DIANA BACHTIAR

C100140214

FAKULTAS ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PEMBELIAN MOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

PUBLIKASI ILMIAH

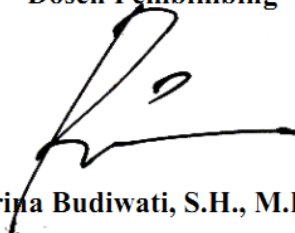
oleh:

ARNO DIANA BACHTIAR

C100140214

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Septarina', with a long horizontal stroke extending to the right.

Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN.

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PEMBELIAN MOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

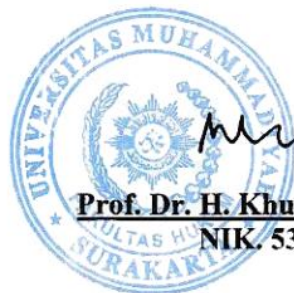
OLEH
ARNO DIANA BACHTIAR
C100140214

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 23 Desember 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Desember 2020

Penulis



ARNO DIANA BACHTIAR
C100140214

ANALISIS YURIDIS PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA

Abstrak

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia maka ketentuan mengenai perjanjian diatur pada Pasal 1313 KUHPerdata: a) Bahwa Debitur mengajukan permohonan pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor kepada Kreditur; b) Debitur mendapatkan persetujuan dari (Istri/suami/Dewan Komisaris (bagi PT) selaku (suami/istri/dewan komisaris); c) Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kendaraan bermotor kepada Debitur. Pasal 6 ayat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu seperti: Pembiayaan kendaraan bermotor, Pembiayaan alat-alat rumah tangga, Pembiayaan barang-barang elektronik, Pembiayaan perumahan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1320 KHUPerdata, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, diantaranya yaitu: a) sepakat mereka yang mengikat dirinya bahwa Debitur telah mengajukan permohonan pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor kepada Kreditur. b) Kecakapan Bertindak untuk Membuat Suatu Perjanjian, perjanjian pembiayaan diwakili oleh XXX selaku Branch Manager. c) Adanya suatu hal tertentu, Debitur telah mengajukan permohonan pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor kepada Kreditur. d) Suatu Sebab yang halal. Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Akan tetapi pada Pasal 16 perjanjian mengenai Pengakhiran berisi sepanjang mengenai pengakhiran jangka waktu perjanjian, para pihak dengan ini sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kata kunci: jaminan fidusia pada pembiayaan konsumen, konstruksi pembiayaan konsumen, tanggungjawab hukum para pihak

Abstract

The approach method used in this research is the normative method, because in this study what will be examined are legal principles, legal principles regarding the explanation of the motorbike financing agreement with fiduciary guarantees. The type of research used is descriptive, namely to clearly describe the explanation of the motorbike financing agreement with a fiduciary guarantee. The results of the research show that the legal construction of a consumer financing agreement for the purchase of motorized vehicles with fiduciary guarantees, the

provisions regarding the agreement are regulated in Article 1313 of the Civil Code: a) That the debtor submits a consumer financing application for the purchase of motorized vehicles to the creditor; b) The debtor is approved by (wife / husband / Board of Commissioners (for PT) as (husband / wife / board of commissioners); c) The creditor agrees to provide motor vehicle consumer financing facilities to the debtor. Article 6 paragraph of the Regulation of the Minister of Finance Number 84 / PMK.012 / 2006 concerning Financing Companies, namely such as: motor vehicle financing, household appliances financing, electronic goods financing, housing financing. Based on the applicable legal provisions as described in Article 1320 Civil Registry, the agreement is said to be valid if it fulfills 4 (four) conditions, including: a) they agree that the Debtor has submitted a consumer financing application for the purchase of a motorized vehicle to the creditor. b) Acting Skills to Make an Agreement, the financing agreement is represented by XXX as Branch Manager. c) There is a certain matter, the Debtor has submitted a consumer financing application for the purchase of a motorized vehicle to the Creditor. d) A cause that is lawful. The party to which the engagement is not fulfilled can choose; force the other party to comply with the agreement, if it is still possible, or demand cancellation of the agreement, with reimbursement of costs, losses and interest. However, in Article 16 of the agreement regarding Termination, as long as the termination of the agreement is concerned, the parties hereby agree to set aside the provisions of articles 1266 and 1267 of the Civil Code.

Keywords: fiduciary guarantee on consumer financing, consumer financing construction, legal responsibility for the parties

1. PENDAHULUAN

Pengembangan ilmu Hukum di bidang industri berbasis nilai-nilai keislaman yang memberi arah pada perubahan, melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama. Selain itu mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi hukum dibidang industri berbasis nilai-nilai ke-Islaman yang memberi arah pada perubahan. melalui kegiatan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta kerjasama.

Kebutuhan akan dana bagi seseorang merupakan hal yang biasa kita jumpai sehari-hari, hal ini diiringi dengan kebutuhan hidup sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan sebagai suatu modal usaha di berbagai bidang bisnis. Di lain pihak juga ada sebagian orang atau kumpulan orang-orang atau lembaga maupun badan hukum yang memiliki kelebihan dana meskipun hanya bersifat

sementara dan dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis maupun sosial.

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang lebih penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut diatas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.

Pembiayaan konsumen merupakan sebuah system model pembiayaan yang dilakukan perusahaan finansial selain daripada aktivitas berupa *leasing* dan *factoring* serta kartu kredit (Fuady, 2002). Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen (*consumers finance*) adalah kegiatan pengadaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan melakukan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan knsumen merupakan suatu pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan tidak digunakan untuk tujuan produksi maupun distribusi (Kasmir, 2008).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan pasal 1 perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Berdasarkan definisi di atas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebaga berikut (Sunaryo, 2009): a) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan khusus di didirikan untuk melakukan kegiatanyang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaanl; b) Kegiatan pembiayaan, yaitumelakukan pekerjaan atau aktifitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan; c) Penyedia dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan; d) Barang Konsumsi, yaitu barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan

sebagainya; e) Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya; f) Masyarakat yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Pembiayaan konsumen merupakan bagian daripada kredit konsumsi (*consumer credit*) yang letak perbedaannya jika pembiayaan dilakukan oleh sebuah perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank (Fuady, 2006). Proses pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga kepada konsumen harus disertai dengan jaminan. Jaminan yang pada umumnya digunakan berupa benda bergerak yang mana masih dapat digunakan oleh pemiliknya yang biasa disebut dengan jaminan fidusia (Setyorini & Muwato, 2017).

Pembiayaan Konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), akan tetapi pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Perusahaan pembiayaan yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan utang piutang. Sementara itu utang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Dimana jaminan berupa gadai dirasa kurang memadai kebutuhan sehingga diperlukan jaminan atas benda bergerak, namun jaminan tersebut masih dapat dipakai oleh pemiliknya untuk keperluan pribadi maupun usahanya, hal demikian dikenal dengan fidusia (Sofwan, 1977).

PT. Danastra merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), yang berfokus pada kredit kendaraan untuk roda dua. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang dibayarkan oleh konsumen secara angsuran atau berkala. Pada PT. Danastra perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian utang piutang antara PT. Danastra dengan

konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan atas kepercayaan.

Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dijamin oleh undang-undang. Pengaturan tentang hak dan kewajiban kreditor dan debitur dalam perjanjian mencerminkan sejumlah asas yang menjadi prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian. Kreditor memiliki kewajiban, antara lain sebagai berikut: a) Berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan apabila telah membayar di muka. Dalam hal ini kreditor akan memberikan barang yang diperjanjikan yaitu sebuah mobil apabila debitur telah membayar uang muka; b) Menyerahkan sebagai hak milik atas barang yang diperjanjikan kepada konsumen setelah konsumen menyelesaikan angsuran terakhirnya. Pertanggung jawaban terhadap barang yang diperjanjikan rusak atau hilang diluar kemauannya, maka pembeli sewa harus mau untuk menggantinya; c) Kreditor berkewajiban untuk menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan dan kemampuan debitur.

Kewajiban dari pihak debitur itu sendiri antara lain: a) Debitur berkewajiban untuk menyerahkan kepada kreditor baik secara langsung dan atau/ melalui penjual semua data, informasi dan dokumen persyaratan pembiayaan; b) Debitur berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini melalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh kreditor; c) Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini merupakan beban dan harus dibayar seluruhnya oleh debitur sampai perjanjian ini berakhir; d) Untuk menjamin seluruh pembayaran, maka debitur setuju untuk menjaminkan barang secara fidusia kepada kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; e) Debitur berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada kreditor mengenai alamat yang akan digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan perjanjian ini.

Beberapa kendala yang terjadi pada perjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia yang dilakukan konsumen dan dimana konsumen mengajukan pembiayaan motor. Pembiayaan dilakukan oleh dengan nominal yang disepakati dengan angsuran yang harus dibayarkan oleh konsumen setiap bulannya dengan

jangka waktu 12 kali cicilan. Akan tetapi pada beberapa cicilan konsumen tidak membayarkannya tepat waktu, hal ini dianggap sebagai wasnprestasi dan berdasarkan perjanjian yang disepakati maka konsumen akan dikenakan denda.

Pemberian pinjaman (utang) oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada kepercayaan bahwa debitor mampu melunasi utangnya yang mana dalam pengikatan utang tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat atas permodalannya maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga jaminan dalam bentuk hipotek dirasa tidak cukup mengakomodir kebutuhan permodalan bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan benda tidak bergerak misalnya tanah sebagai objek jaminan atas utang mereka. Di lain sisi, keberadaan lembaga jaminan gadai dirasa tidak cukup untuk menjawab keterbatasan masyarakat dikarenakan objek jaminannya benda bergerak gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai dan selanjutnya dipegang oleh kreditor pemegang gadai (vuistpand) atau pihak ketiga pemegang gadai. Hal tersebut kemudian menjadi penghalang bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dengan tujuan untuk membeli benda produksi (sebagai modal kerja) dan transportasi.

Kebutuhan masyarakat tersebut kemudian menjadi awal lahirnya Jaminan Fidusia. Pada prakteknya pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki banyak permasalahan diantaranya terkait pendaftaran Jaminan Fidusia, penarikan objek Jaminan Fidusia, penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum baik bagi kreditor dan debitor. Permasalahan penarikan objek Jaminan Fidusia merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh Konsumen. Hal tersebut disebabkan penarikan oleh pihak perusahaan dilakukan tanpa membawa Sertifikat Jaminan Fidusia dan melibatkan pihak debt collector dalam proses penarikan kendaraan (eksekusi) yang mana debt collector tidak membawa atau tidak memiliki surat kuasa dari perusahaan, sertifikat Jaminan Fidusia dan penarikan kendaraan yang tidak didahului Surat Peringatan sampai 3 (tiga) kali.

Pengertian Jaminan fidusia diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah; “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai ketentuan perjanjian pembiayaan motor dan implementasi. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul skripsi: “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pembelian Kendaraan Motor Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di PT. Danastra)”.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia (Muhammad, 2004). Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan motor dengan jaminan fidusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pembelian Kendaraan Motor Dengan Jaminan Fidusia

Berdasarkan analisis data tentang konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia maka ketentuan mengenai perjanjian diatur pada Pasal 1313 KUHPdata, yaitu; “Perjanjian adalah perbuatan dengana mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Para Pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a) Bahwa Debitur telah mengajukan permohonan pembiayaan konsumen untuk

pembelian kendaraan bermotor kepada Kreditur; b) Bahwa Debitur telah mendapatkan persetujuan dari (Istri/suami/Dewan Komisaris (bagi aplikan PT) selaku (suami/istri/dewan komisaris); c) Bahwa atas permohonan dimaksud, Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kendaraan bermotor kepada Debitur.

Perjanjian pembiayaan konsumen pembelian kendaraan motor dengan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Barang kebutuhan konsumen yang dimaksud yaitu seperti: Pembiayaan kendaraan bermotor, Pembiayaan alat-alat rumah tangga, Pembiayaan barang-barang elektronik, Pembiayaan perumahan.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1320 KHUPerdata, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, diantaranya yaitu: a) sepakat mereka yang mengikat dirinya; b) kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian; c) adanya objek atau suatu hal tertentu dan; d) suatu sebab yang halal.

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi bank dalam memberikan kredit kepada debitur harus mengutamakan unsur keyakinan, bahwa debitur sanggup dan mampu untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang di perjanjikan.

Ketentuan ini dijelaskan pada Pasal 8 tentang Agunan

Kekurangan daripada perjanjian ini yaitu tidak adanya *force majeure*. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Force Majeur sangat penting dicantumkan di dalam perjanjian atau Kontrak guna untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan dan berpotensi menyebabkan konflik diantara para pihak terkait. Klausula Force Majeur biasanya berada di perjajian untuk melindungi Debitur dari keadaan yang memaksanya untuk tidak melakukan hal

yang terdapat dalam Kontrak/Perjanjian, dengan adanya Force Majeur ini maka apabila terjadi Keadaan yang tidak diharapkan seperti bencana alam atau yang lainnya maka saat Debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka Debitur tidak dapat dituntut atas biaya, rugi dan bunga.

3.2 Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen Pembelian Kendaraan Motor Dengan Jaminan Fidusia

Pasal 14 Pengalihan Hak dan Kewajiban yang terdiri dari: a) Kreditur berhak dan tanpa memerlukan persetujuan Debitur untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian kepada pihak manapun juga; b) Debitur berhak untuk mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian ini berdasarkan persetujuan tertulis dari Kreditur dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Kreditur. Ketentuan ini merupakan kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan; b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang; c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ketentuan daripada asuransi tidak sesuai dengan Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; c) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; d) Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 3R dapat dijelaskan sebagai berikut (Rosyida, 2014): a) *Return* (hasil yang dicapai), yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan, apakah hasil tersebut bisa menutup pembiayaannya atau tidak. Return juga bisa diartikan sebagai keuntungan yang akan diperoleh lembaga keuangan apabila memberikan

pembiayaan pada pemohon.; b) *Repayment* (pembayaran kembali), yaitu lembaga keuangan harus menilai berapa lama perusahaan pemohon pembiayaan dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayara kembali, serta apakah pembiayaan harus diangsur, atau dilunasi diakhir periode sekaligus; c) *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko), yaitu lembaga keuangan harus mengetahui dan menilai sejauh mana perusahaan pemohon pembiayaan mampu menanggung risiko pembiayaan ketika terjadi suatu yang tidak diinginkan. Selain itu, kemampuan menanggung risiko juga diterapkan bagi lembaga keuangan, yaitu dengan cara meminta agunan kepada calon debitur.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan tentang konstruksi hukum perjanjian pembiayaan konsumen pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia maka ketentuan mengenai perjanjian diatur pada Pasal 1313 KUHPdata: a) Bahwa Debitur mengajukan permohonan pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor kepada Kreditur; b) Debitur mendapatkan persetujuan dari (Istri/suami/Dewan Komisaris (bagi aplikan PT) selaku (suami/istri/dewan komisaris); c) Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kendaraan bermotor kepada Debitur. Pasal 6 ayat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu seperti: Pembiayaan kendaraan bermotor, Pembiayaan alat-alat rumah tangga, Pembiayaan barang-barang elektronik, Pembiayaan perumahan.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1320 KHUPdata, perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, diantaranya yaitu: a) sepakat mereka yang mengikat dirinya bahwa Debitur telah mengajukan permohonan pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor kepada Kreditur. b) Kecakapan Bertindak untuk Membuat Suatu Perjanjian, perjanjian pembiayaan diwakili oleh XXX selaku Branch Manager. c) Adanya suatu hal tertentu, para Pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing bahwa Debitur telah mengajukan permohonan pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor kepada Kreditur; debitur telah mendapatkan

persetujuan dari (Istri/suami/Dewan Komisaris (bagi aplikan PT) selaku (suami/istri/dewan komisaris) dan permohonan dimaksud, Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kendaraan bermotor kepada Debitur. c) Adanya Objek atau Suatu hal Tertentu, para Pihak mengajukan permohonan pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan bermotor kepada Kreditur, Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kendaraan bermotor kepada Debitur. d) Suatu Sebab yang halal.. Pasal 8 perjanjian menjelaskan untuk menjamin debitur dan/atau pemilik barang dengan ini menyerahkan hak milik atas barang sebagai jaminan berupa penyerahan Hak Milik secara fidusia atas kendaraan yang dibeli dengan menahan surat BPKB oleh kreditur sampai pada angsuran selesai.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1266 KUH Perdata “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Pasal 1267 KUH Perdata; “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Akan tetapi pada Pasal 16 perjanjian mengenai Pengakhiran berisi sepanjang mengenai pengakhiran jangka waktu perjanjian, para pihak dengan ini sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4.2 Saran

Untuk Pihak Kreditur, diharapkan melakukan survey dengan standar 5 credit of letter, sehingga memudahkan pihak perusahaan dalam menentukan debitur dan menghindari wanprestasi daripada debitur.

Untuk pihak Debitur, diharapkan membaca lebih teliti mengenai isi perjanjian dengan teliti dan memberikan jaminan yang sesuai dengan kredit yang diajukan sehingga pihak kreditur tidak menemui hambatan mengenai akibat daripada perjanjian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir. (2002). *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen (Dalam Teori Dan Praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Fuady, Munir. (2006). *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.

LUHPerdata

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Rosyida, Asna Afifah. (2014). *Penerapan Prinsip Pemberian Pembiayaan Murabahah di BMT Ar-Rahman Tulungagung*, Skripsi

Setyorini, Aristya & Muwato, Agus. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Dapat Didaftarkan. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2017*

Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. (1977). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia dalam Praktek dan Pelaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM

Sunaryo. (2009). *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen